



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2023

Pengarah:

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penanggung Jawab:

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penulis:

Prasetyo Hadi
Dewi Yuliana Lestari
Sri Handiman Supyansuri
Vitya Rani Hapsari
Nurjiyanto

Pengolah Data:

Marina
Maulana Agung Nugraha
Anisa Nurmalitasari
Deden Djati Kusuma
Renaldiansyah
Eni Eryani

Diterbitkan oleh:

Bagian Perencanaan Program & Pelaporan
Setditjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan peningkatan kualitas komunikasi publik menjadi arah kebijakan dan strategis yang tertuang dalam bagian konsolidasi demokrasi sesuai arah RPJMN 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat dimana arah kebijakan RPJMN 2020-2024 diturunkan pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 dan diadopsi pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 2020-2024 dalam Keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Nomor 25 Tahun 2022. Adapun kinerja yang belum tercapai perlu didorong perbaikannya dan yang telah tercapai perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga seluruh sasaran kinerja dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 2020-2024 dapat tercapai pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyajikan upaya dan hasil yang dicapai sepanjang tahun 2023. Perhitungan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2023 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Januari 2023 dan penyesuaian pada Agustus 2023. Penyesuaian dilakukan karena adanya perubahan posisi pimpinan.

Aspek peningkatan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik merupakan turunan utama kebijakan dan program prioritas pemerintah yang menjadi Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. Laporan kinerja ini juga menggambarkan kontribusi pada Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 pada aspek Peningkatan Kualitas Tata Kelola terkait dengan Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja, dan Kinerja Anggaran.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 sebesar 108,94 poin dari 10 indikator sasaran program secara kumulatif atau naik 1 poin apabila dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 107,66 poin secara kumulatif dari 8 indikator sasaran program.

| SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | POLARISASI | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | CAPAIAN % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| SP.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Program dan Kebijakan Prioritas Pemerintah | | | | | |
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | % | Maximize | 73 | 80.50 | 110.27 |
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | % | Maximize | 73 | 78.40 | 107.40 |
| Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik | % | Maximize | 65 | 83,50 | 108.44 |
| Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter | % | Maximize | 70 | 80.92 | 115.60 |
| Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Nilai | Maximize | 75 | 67.23 | 89.64 |
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers | % | Maximize | 70 | 85 | 121,43 |
| SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan | Dokumen | Maximize | 5 | 5 | 100,00 |
| SP.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | | | | | |

| SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | POLARISASI | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | CAPAIAN % |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP Tahun 2023 | Nilai | Maximize | 79,03 | 85,75 | 108,50 |

Tabel i. Nilai Pencapaian Sasaran Program Tahun 2022

| SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | POLARISASI | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| SP.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Program dan Kebijakan Prioritas Pemerintah | | | | | |
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | % | Maximize | 79 | 86,83 | 109,916 |
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | % | Maximize | 79 | 85,94 | 108,789 |
| Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik | % | Maximize | 77 | 83,50 | 108,44 |
| Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter | % | Maximize | 70 | 72,82 | 104,03 |
| Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang berlaku | % | Maximize | 80 | 82,67 | 103,34 |
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers | % | Maximize | 70 | 85 | 121,43 |

| SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | POLARISASI | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan | Dokumen | Maximize | 5 | 5 | 100,00 |
| SP.3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Media Komunikasi | | | | | |
| Persentase (%) Pelayanan Informasi dan Pelestarian Bidang Pers dan Komunikasi dan Informasi | % | Maximize | 100 | 100 | 100 |
| SP.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | | | | | |
| Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP Tahun 2023 | Nilai | Maximize | 79,03 | 85,75 | 108,50 |
| Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) | Nilai | Maximize | 80 | 100 | 125,00 |

Tabel ii. Nilai Pencapaian Sasaran Program Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. LAKIP disusun berdasarkan sasaran kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Laporan ini mencakup rangkaian program dan kegiatan, pencapaian, serta evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik periode tahun 2023.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian program kerja dan kegiatan Ditjen IKP yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berkomitmen penuh untuk memberikan inovasi dan peningkatan kualitas program kerja demi mewujudkan kebermanfaatan untuk masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan masukan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LAKIP Ditjen IKP Tahun 2023 ini. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi pijakan untuk peningkatan kinerja Ditjen IKP yang lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2024

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Usman Kansong

DAFTAR ISI

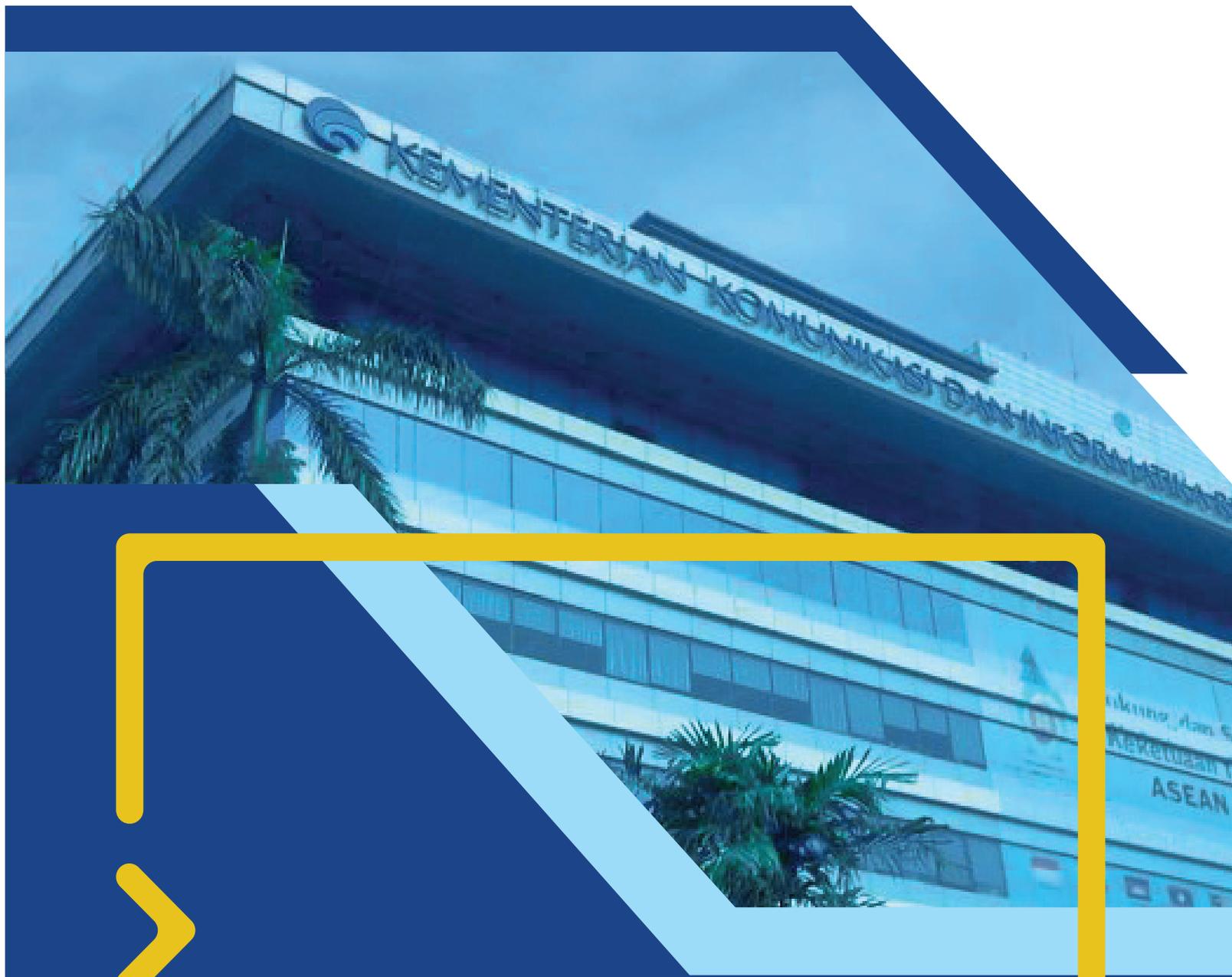
| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Struktur Organisasi | 4 |
| B. Kedudukan dan Fungsi | 5 |
| C. Sumber Daya Manusia | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| A. RPJMN 2020-2024 | 10 |
| B. Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024 | 13 |
| C. Rincian Rencana Kerja Ditjen IKP | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS | 21 |
| A. Sasaran Program Ditjen IKP | 22 |
| B. Pengukuran Kinerja Ditjen IKP | 25 |
| C. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP | 36 |
| D. Capaian Kinerja Lainnya | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran dan Upaya Perbaikan | 63 |
| C. Kendala dan Permasalahan | 65 |
| Referensi | 66 |
| Lampiran Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 & 2023 | 68 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. | SDM Berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP | 7 |
| Tabel 2. | SDM Berdasarkan Golongan Ruang di Lingkup Ditjen IKP | 8 |
| Tabel 3. | SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen IKP ... | 8 |
| Tabel 4. | Dukungan Kemenkominfo terhadap RPJMN 2020-2024 | 13 |
| Tabel 5. | Sasaran Strategis Kemenkominfo 2020-2024 | 14 |
| Tabel 6. | Indikator Pencapaian Sasaran Strategis IX | 15 |
| Tabel 7. | Rencana Anggaran dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 19 |
| Tabel 8. | Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Tahun Anggaran 2023 | 24 |
| Tabel 9. | Capaian Kinerja Eselon I Ditjen IKP | 25 |
| Tabel 10. | Perbandingan Capaian Kinerja Komunikasi Publik 5 (Lima) Tahun Terakhir | 27 |
| Tabel 11. | Isu Prioritas yang Disurvei | 28 |
| Tabel 12. | Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait dengan Isu Prioritas Nasional 2023 | 30 |
| Tabel 13. | Capaian Kinerja: Berita Hoax yang Berhasil Dikonter Tahun 2023 | 31 |
| Tabel 14. | Rincian Survei PSO Antara | 33 |
| Tabel 15. | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2023 | 37 |
| Tabel 16. | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2023 | 41 |
| Tabel 17. | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Tahun 2023 | 45 |
| Tabel 18. | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023 | 48 |
| Tabel 19. | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2023 | 51 |
| Tabel 20. | Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023 | 53 |
| Tabel 21. | Capaian Perjanjian Kinerja Museum Penerangan Tahun 2023 ... | 55 |
| Tabel 22. | Capaian Perjanjian Kinerja Monumen Pers Tahun 2023 | 57 |
| Tabel 23. | Korelasi Indikator Kinerja Ditjen IKP terhadap IKK Kemenkominfo | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi | 4 |
| Gambar 2. | Skema RPJPN 2005-2025 | 10 |
| Gambar 3. | Program Prioritas Nasional | 11 |
| Gambar 4. | Alur Kerja <i>Government Public Relation</i> | 17 |
| Gambar 5. | Proses Pencapaian Kinerja Ditjen IKP | 20 |



BAB I

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dewasa ini terutama sejak pandemi Covid 19 melanda dunia mulai tahun 2020. Dinamika yang begitu cepat itu telah mendorong beragam perubahan di lingkup masyarakat dan pemerintah mengenai cara berkomunikasi dan mengakses informasi.

Di lingkup pemerintah, beragam penyesuaian dalam pelayanan informasi dan komunikasi diperlukan di tengah perubahan yang begitu cepat supaya cita-cita membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa tetap dapat terwujud. Cita-cita tersebut sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dan mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta proses dan alasan kebijakan pemerintah. Komunikasi pemerintah dengan demikian harus dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan terpercaya sebagai upaya mendapatkan kepercayaan publik. Untuk dapat menjawab beragam tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan pada RPJMN 2020-2024 adalah melanjutkan kebijakan sebelumnya bahwa pemerintah akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui penguatan Government Public Relations (GPR). GPR merupakan program yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang kehadirannya untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan Kementerian dan Lembaga Negara untuk:

1. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
2. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
3. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; dan
4. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada

masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai koordinator pengelolaan komunikasi publik dalam Inpres No. 9 Tahun 2015 diberikan tugas khusus sebagai berikut:

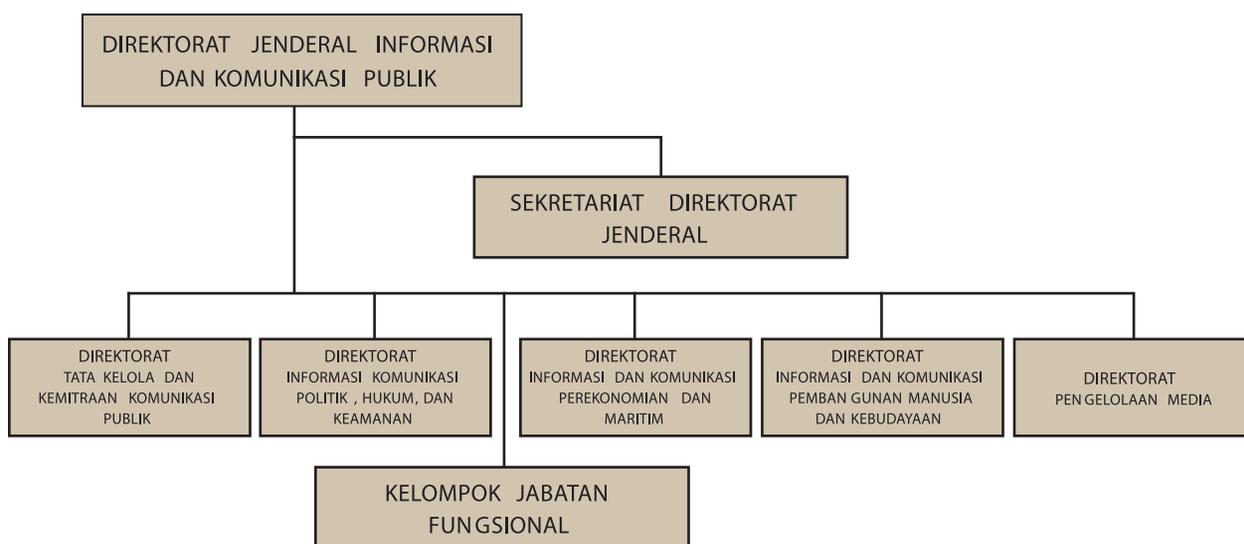
1. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
2. melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
3. melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
4. menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2015, Kemenkominfo sebagai koordinator pengelola komunikasi publik berupaya mengintegrasikan konten informasi terkait dengan program dan kebijakan pemerintah dalam satu “frame” narasi tunggal sehingga terwujud kesamaan data dan sudut pandang komunikasi. Data yang terintegrasi itu secara kelembagaan berguna untuk menyinergikan informasi di lingkup pemerintah secara horizontal dan vertikal serta menjaring aspirasi masyarakat sebagai masukan kebijakan secara sinergis.

Kemenkominfo dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2015 memiliki peran terkait dengan pengelolaan diseminasi, edukasi/literasi, klarifikasi, dan menyusun kontranarasi isu terkait kebijakan dan program pemerintah. Untuk menjawab hal tersebut, Ditjen IKP dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 menetapkan strategi melalui program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik.

Fokus yang menjadi acuan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk mencapai target Rencana Strategis 2020-2024 adalah adanya peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Koridor yang dijadikan acuan perjanjian kerja itu mengacu langsung kepada sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yakni peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

A. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di lingkungan Ditjen IKP di tahun 2023 merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2018. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 yang berlaku mulai 5 Oktober 2021, organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami penyederhanaan birokrasi. Di lingkungan Ditjen IKP, setiap satuan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 tidak lagi terdiri dari Jabatan Struktural Eselon 3 dan 4 atau Administrator dan Pengawas tetapi terdiri dari beragam kelompok jabatan fungsional.

Khusus mengenai Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan Ditjen IKP diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersendiri. Struktur organisasi UPT Museum Penerangan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan sedangkan UPT Monumen Pers Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2022.

B. Kedudukan dan Fungsi

Sejak 17 April 2023, tugas dan fungsi Ditjen IKP diatur melalui Perpres No. 22 Tahun 2023. Ditjen IKP sesuai Pasal 20 Perpres No. 22 Tahun 2023 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Ditjen IKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya Sesuai dengan Bab VII Pasal 102 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkominfo, Ditjen IKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen IKP sebagaimana Pasal 102 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen IKP memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di setiap bidang tugas dan tanggung jawabnya. Total ada 267 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melaksanakan roda organisasi di tahun 2023.

| NO | UNIT/SATUAN KERJA | JUMLAH PEGAWAI | STRUKTURAL | FUNGSIONAL | PELAKSANA |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Direktur Jenderal IKP | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik | 49 | - | 18 | 31 |
| 3 | Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik | 40 | 1 | 18 | 21 |
| 4 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan | 32 | - | 10 | 22 |
| 5 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 33 | 1 | 11 | 21 |
| 6 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 33 | 1 | 11 | 21 |
| 7 | Direktorat Pengelolaan Media | 30 | 1 | 22 | 7 |
| 8 | Museum Penerangan | 21 | 2 | 8 | 11 |
| 9 | Monumen Pers Nasional | 28 | 2 | 14 | 12 |
| | Jumlah | 267 | 9 | 112 | 146 |

Tabel 1. SDM Berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP

Dari total 267 ASN di lingkup Ditjen IKP pada tahun 2023 sebagaimana Tabel 1, sebanyak 262 diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pangkat/golongan ruang PNS di lingkup Ditjen IKP tahun 2023 bervariasi. Variasi pangkat/golongan ruang tersebut mulai dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) hingga Pembina Utama Madya (IV/d).

| NO | NAMA PANGKAT | GOLONGAN RUANG | JUMLAH PEGAWAI |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | Pembina Utama | IV/e | 0 |
| 2 | Pembina Utama Madya | IV/d | 3 |
| 3 | Pembina Utama Muda | IV/c | 3 |
| 4 | Pembina Tingkat I | IV/b | 12 |

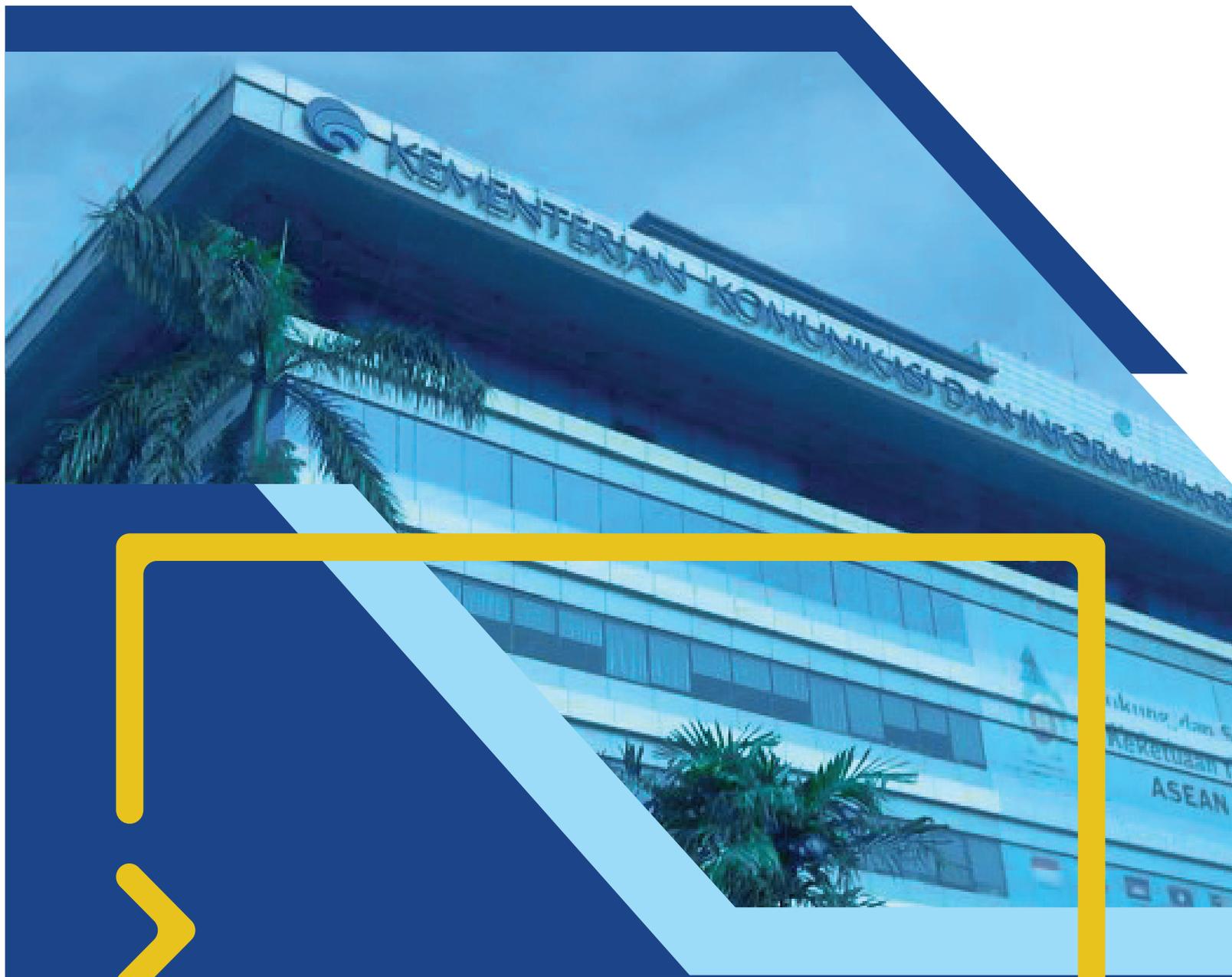
| NO | NAMA PANGKAT | GOLONGAN RUANG | JUMLAH PEGAWAI |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|
| 5 | Pembina | IV/a | 18 |
| 6 | Penata Tingkat I | III/d | 66 |
| 7 | Penata | III/c | 32 |
| 8 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 48 |
| 9 | Penata Muda | III/a | 69 |
| 10 | Pengatur Tingkat I | II/d | 1 |
| 11 | Pengatur | II/c | 11 |
| 12 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 4 |
| 13 | Pengatur Muda | II/a | 0 |
| 14 | Juru Tingkat I | I/d | 0 |
| 15 | Juru | I/c | 0 |
| 16 | Juru Muda Tingkat I | I/b | 0 |
| 17 | Juru Muda | I/a | 0 |
| Jumlah | | 267 | |

Tabel 2. SDM Berdasarkan Golongan Ruang di Lingkup Ditjen IKP

Jenjang pendidikan ASN di lingkup Ditjen IKP bervariasi mulai dari SD hingga Strata 3 Tingkat pendidikan ASN dengan jumlah terbanyak adalah lulusan Strata I.

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1. | Strata 3 | 3 |
| 2. | Strata 2 | 66 |
| 3. | Strata 1 | 157 |
| 4. | Diploma | 21 |
| 5. | SLTA | 17 |
| 6. | SLTP | 1 |
| 7. | SD | 2 |
| Jumlah | | 267 |

Tabel 3. SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen IKP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan disusun sebagai acuan untuk mencapai target yang menjadi sasaran atas tugas dan fungsi yang diemban oleh Ditjen IKP. Rencana yang menjadi acuan itu tertuang dalam dokumen perencanaan yang substansinya tidak terlepas dari sasaran yang dijadikan target oleh pemerintah sesuai visi pembangunan nasional.

A. RPJMN 2020-2024

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**.



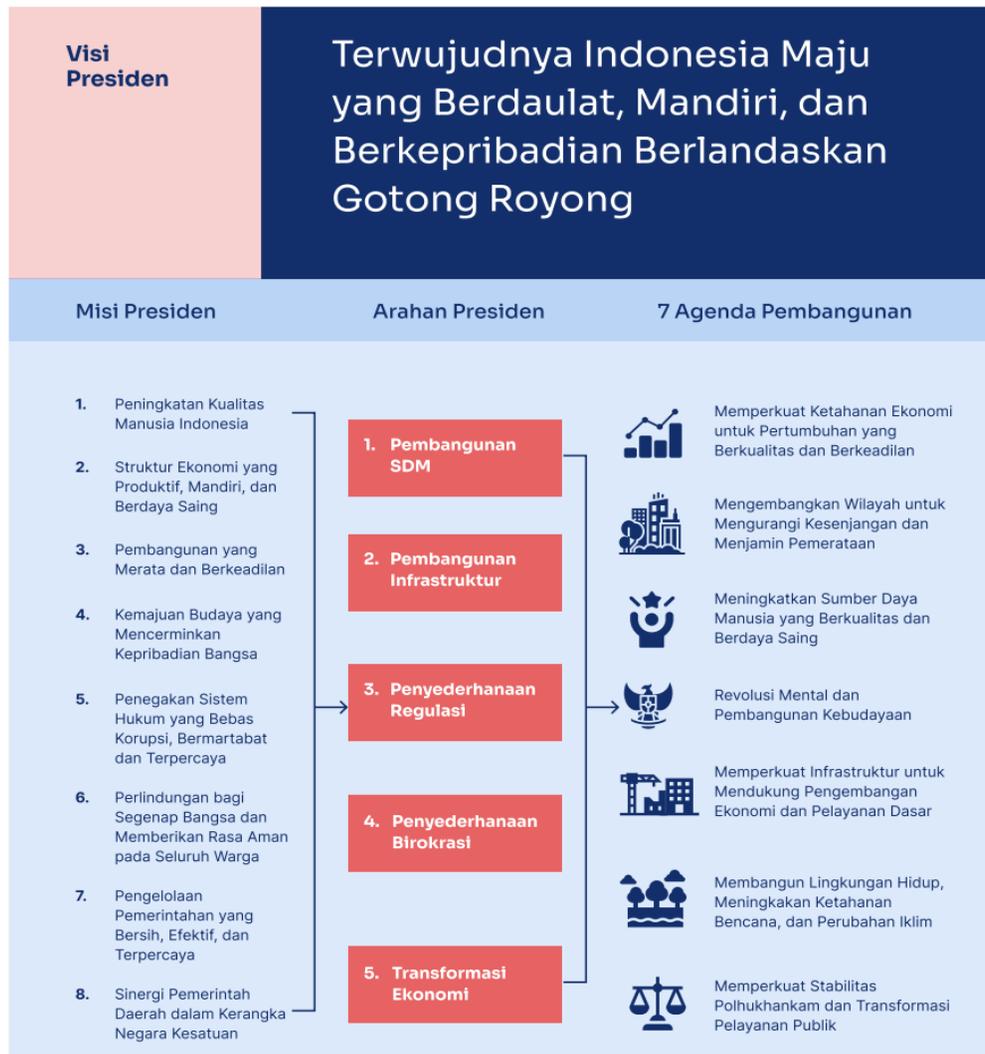
Gambar 2. Skema RPJPN 2005-2025

Sumber : Bappenas

Perencanaan jangka panjang 2005-2025 selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahunan. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selama periode 2020-2024, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan infrastruktur
- c. Penyederhanaan regulasi
- d. Penyederhanaan birokrasi
- e. Transformasi ekonomi

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 Agenda Pembangunan (AP) atau juga dikenal dengan Prioritas Nasional (PN) meliputi:



Gambar 3. Program Prioritas Nasional

Pasca penetapan RPJMN, seluruh K/L termasuk Kemenkominfo diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi Presiden yang bersangkutan dan

dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Rencana Strategis Kemenkominfo Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK serta pengelolaan dan penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Kemenkominfo mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada 2 Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yaitu PN-5 dan PN-7. Khusus Ditjen IKP, tanggung jawabnya adalah berkaitan dengan PN-7.

| Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional | | Strategi | UKE I |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PN-5 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>) untuk meraih digital dividend 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas 4. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G) 5. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional 6. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman 7. Meningkatkan literasi digital masyarakat 8. Mempercepat pembangunan dan | DJSDPPI, DJPPI, DJAPTIKA, BAKTI |

| Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional | | Strategi | UKE I |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia 9. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 10. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait | |
| PN-7 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital 2. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir 3. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah 4. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran | DJKP, BPSDM, SETJEN |

Tabel 4. Dukungan Kemenkominfo terhadap RPJMN 2020-2024

B. Rencana Strategis Kemenkominfo 2020–2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah acuan yang menjadi basis arah Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo 2020-2024. Fokus dari Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 adalah untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital di tiga aspek meliputi bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Selanjutnya dari tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang mencerminkan *outcome* Kemenkominfo sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkominfo pada Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran Strategis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos 4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika |
| 2 | Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis 2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital 3. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah |
| 3 | Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik |

Tabel 5. Sasaran Strategis Kemenkominfo 2020-2024

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, kontribusi yang dilakukan oleh Ditjen IKP adalah dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Kontribusi Ditjen IKP itu ditujukan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis IX Renstra Kemenkominfo 2020-2024 yakni Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Sasaran strategis IX dalam Renstra Kemenkominfo 2020-2024 merupakan salah satu aspek untuk menjawab tantangan dalam menjaga stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik sesuai amanat RPJMN 2020-2024. Selaras juga dengan Rencana Kerja Pemerintah 2023,

Sasaran Strategis IX Renstra Kemenkominfo 2020-2024 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik pemerintah yang masih kurang terintegrasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat yang masih belum merata.

| Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Tujuan Strategis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik | | | | | | |
| SS.09 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Tabel 6. Indikator Pencapaian Sasaran Strategis IX

C. Rincian Rencana Kerja Ditjen IKP

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2023 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Rencana Kerja (Renja) Kemenkominfo pada Tahun 2023. Secara rinci 5 (lima) program pada Renja Kemenkominfo pada Tahun 2023, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen. Khusus Ditjen IKP Kemenkominfo, tanggungjawabnya mencakup Program Komunikasi Publik.

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui pembangunan komunikasi publik merupakan agenda penting saat ini. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, komunikasi publik mengenai kebijakan pemerintah menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman

tentang pentingnya komunikasi publik dan strategi efektif untuk melaksanakannya sangat diperlukan.

Kunci keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya terletak pada aspek teknokratisnya, tetapi juga pada strategi komunikasi publik yang mendukungnya. Kebijakan yang baik dari sisi teknokratis namun tidak didukung oleh komunikasi publik yang efektif dapat menimbulkan masalah. Hal ini karena fokus hanya pada substansi kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi, tanpa mempertimbangkan bahwa komunikasi publik memiliki peran krusial dalam proses tersebut.

Komunikasi publik saat ini menghadapi delapan masalah utama, yaitu fragmentasi publik, ketergantungan pada komunikasi satu arah, kurangnya pemanfaatan komunikasi digital, rendahnya partisipasi publik, kurangnya koordinasi antar kementerian, ketidakakuratan data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait isu strategis, dan rendahnya kepercayaan publik. Situasi ini diperparah oleh tiga faktor, yaitu polarisasi publik, kemunduran kepakaran, dan penyebaran hoaks. Tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menata kembali pengelolaan komunikasi dan informasi. Komunikasi publik bukan hanya tentang pengelolaan opini publik, tetapi juga tentang bagaimana mengelola proses komunikasi secara keseluruhan yang berlangsung di pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan pemerintah.

Berkaitan dengan komunikasi publik, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan sesuai amanat yang diberikan rakyat senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakannya. Rakyat memiliki hak atas informasi sesuai amanat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Implementasi Pasal 28 F UUD 1945 selanjutnya diperkuat dengan kehadiran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui implementasi keterbukaan informasi publik, masyarakat didorong untuk senantiasa mengetahui, berpartisipasi, dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. Di sisi lain, pemerintah pun dapat lebih mudah mengomunikasikan kebijakannya supaya

dapat terlaksana dengan baik dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik lewat keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik pada gilirannya mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Presiden telah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka percepatan diseminasi informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah. Sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2015, Kemenkominfo mendapat tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi. Dengan demikian, Kemenkominfo pada prinsipnya dalam rangka penyebaran informasi publik program-program pemerintah bertindak sebagai *dirigen* humas pemerintah (Government Public Relations).



Gambar 4. Alur Kerja Government Public Relation

Ditjen IKP Kemenkominfo sepanjang tahun 2023 dalam menjalankan fungsi Government Public Relation (GPR) telah melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik *below the line*, *through the line* dan *above the line*. Dalam melaksanakan diseminasi informasi tersebut, Ditjen IKP juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran yang direncanakan di lingkup Ditjen IKP sebagai berikut:

| No | Anggaran | Sasaran Program | Indikator Kinerja Sasaran Program | Target 2023 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Rp 215.578.529.000 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 79% |
| | | | 2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 79% |
| | | | 3. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 77% |
| | | | 4. Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter | 70% |
| | | | 5. Persentase K/L/D yang sudah melaksanakan urusan pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) sesuai peraturan yang berlaku | 80% |

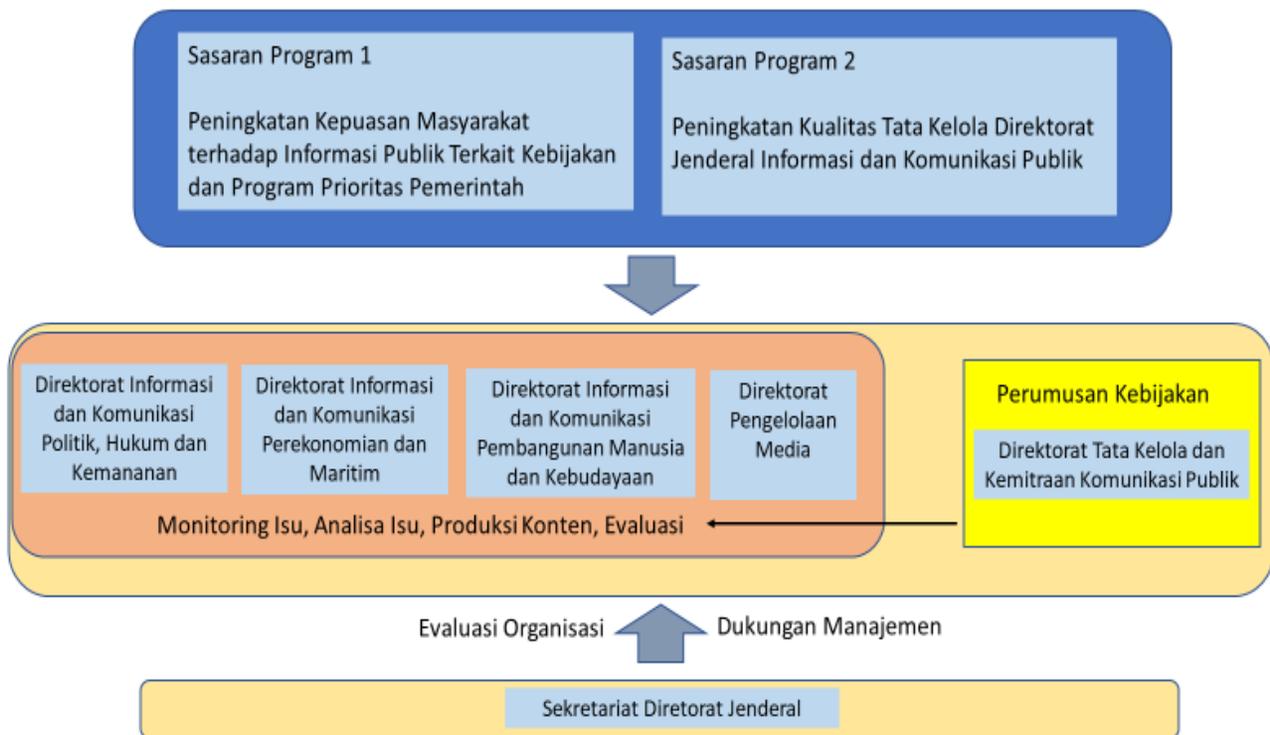
| No | Anggaran | Sasaran Program | Indikator Kinerja Sasaran Program | Target 2023 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| | | | 6. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Melalui PSO Bidang Pers | 70% |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang ditetapkan | 5 Naskah |
| 3 | | Meningkatnya kualitas pengelolaan Media Komunikasi | Persentase (%) pelayanan informasi dan pelestarian bidang pers dan komunikasi dan informasi | 100% |
| | | | Pengelolaan Koleksi | 9 kegiatan dan 16 kegiatan |
| 4 | Rp.100.683.002.000,- | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 80 |

Tabel 7. Rencana Anggaran dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

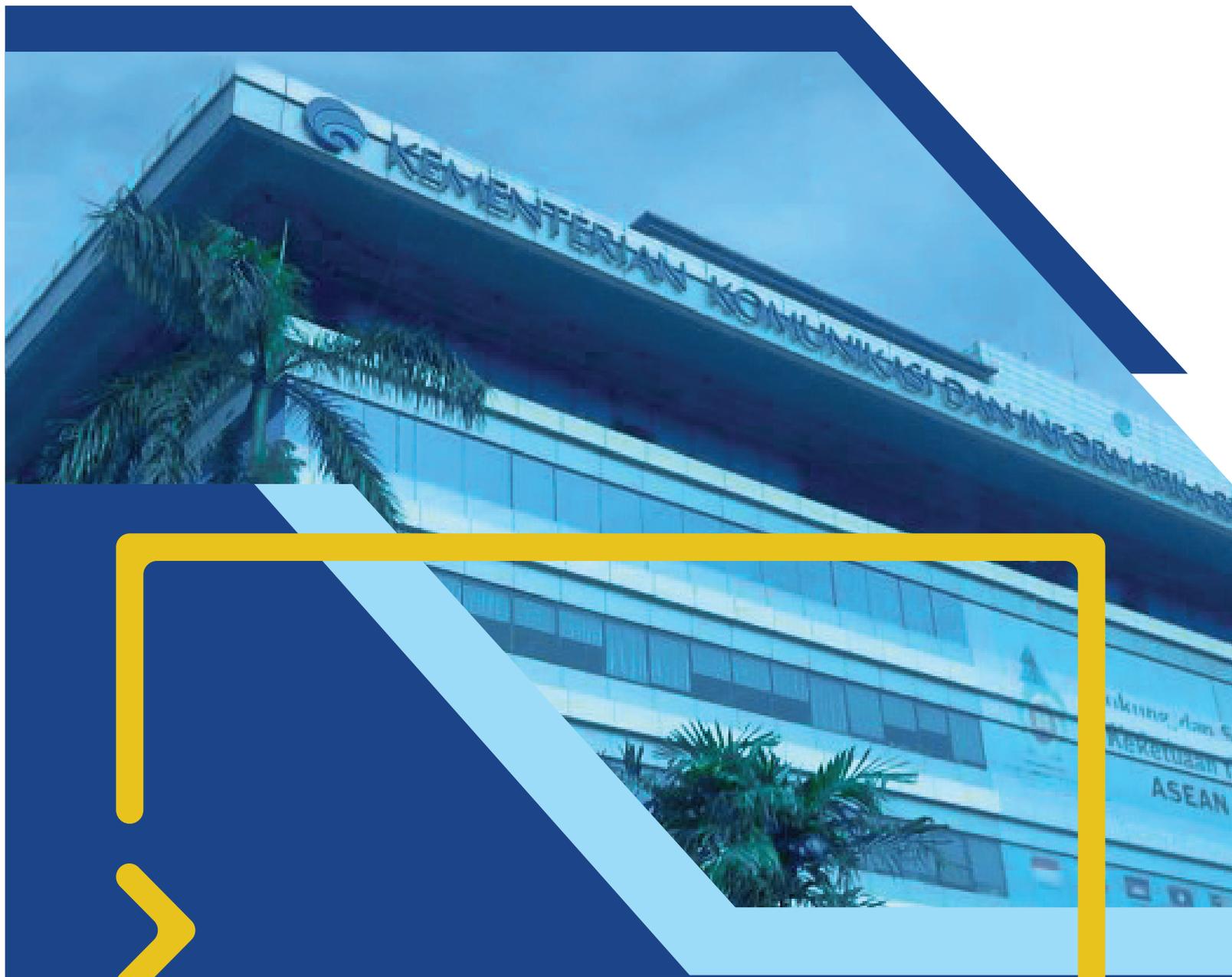
Berdasarkan uraian dalam Bab ini, pelaksanaan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu indikator kinerja Kemenkominfo yang perlu diukur untuk mengetahui sejauhmana capaiannya. Pengukuran pelaksanaan pengelolaan informasi publik tersebut mencakup akses informasi publik, kualitas

informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik.

Dalam rangka pengukuran terhadap akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik, Ditjen IKP di tahun 2023 melaksanakan survei persepsi bekerja sama dengan Markplus.Inc. Ruang lingkup survei tersebut mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.



Gambar 5. Proses Pencapaian Kinerja Ditjen IKP



BAB III

AKUNTABILITAS

A. Sasaran Program Ditjen IKP

Analisis terhadap capaian kinerja organisasi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana capaian atas pelaksanaan target organisasi. Hasil analisis itu dapat menjadi tolok ukur sebagai acuan dalam menetapkan perencanaan periode selanjutnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian hasil terhadap target awal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, target yang menjadi acuan adalah target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran program dan indikator kinerja program selama satu tahun. Indikator kinerja sebagai alat ukur dari keberhasilan sasaran program bersifat kuantitatif/kualitatif supaya dapat menggambarkan tingkat pencapaian baik dari aspek ukuran maupun maknanya.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menjadi rujukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) adalah Sasaran Strategis IX Kemenkominfo yakni meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Indikator sasaran strategis Kemenkominfo itu adalah persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) di tahun 2023 memiliki 1 (satu) sasaran program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis IX Kemenkominfo. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran keberhasilan sasaran program Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ini diukur dengan melihat persepsi publik atas akses informasi publik dan kualitas informasi publik.

Selain sasaran program yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis IX Kemenkominfo, Ditjen IKP juga memiliki sasaran program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik yang diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Indikator sasaran program ini adalah Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi Kementerian/Lembaga/Daerah. Pengukurannya dilakukan berdasarkan jumlah

naskah yang berhasil diselesaikan di lingkup Ditjen IKP dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Terakhir, Ditjen IKP juga memiliki sasaran program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien. Sasaran program ini merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis X Kemenkominfo yakni Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam menggapai sasaran strategis ini, semua unit kerja di lingkup Kemenkominfo secara bersama-sama berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan masing-masing.

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Sasaran Program | Target 2023 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 79% |
| | | 2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 79% |
| | | 3. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 77% |
| | | 4. Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter | 70% |
| | | 5. Persentase K/L/D yang sudah melaksanakan urusan pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) sesuai peraturan yang berlaku | 80% |
| | | 6. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Melalui PSO Bidang Pers | 70% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang ditetapkan a. Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik | 5 Naskah |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Sasaran Program | Target 2023 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | b. Kajian Proses Bisnis Aplikasi Umum Monitoring Isu c. Kajian Layanan Komunikasi Krisis Nasional yang Terintegrasi d. Kajian Naskah Akademik Revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik e. Revisi Peraturan Menkominfo tentang JFPH | |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Media Komunikasi | Persentase (%) Pelayanan Informasi dan Pelestarian Bidang Pers dan Komunikasi dan Informasi a. Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah Bagi Masyarakat | 100% - Jumlah pengunjung Monumen Pers Nasional Sebanyak 100.000 pengunjung - Jumlah Pengunjung Museum Penerangan sebanyak 125.000 pengunjung |
| | | b. Promosi dan Publikasi | - Jumlah Pameran, Dialog, Budaya, dan Roadshow ke sekolah dalam rangka promosi dan publikasi tentang Monumen Pers sebanyak 15 kegiatan - Jumlah kegiatan layanan informasi kepada Masyarakat Melalui Museum Penerangan sebanyak 45 kegiatan |
| | | c. Pengelolaan koleksi | Jumlah penatalaksanaan koleksi Monumen Pers Nasional sebanyak 9 kegiatan |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 80 |

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Tahun Anggaran 2023

B. Pengukuran Kinerja Ditjen IKP

| Capaian Kinerja Eselon I Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik TA 2023 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Indikator Kinerja Sasaran Program | Target 2023 | Capaian Kinerja | Persentase Capaian | Status |
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 79 | 86,83 | 109,91% |  |
| 2 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 79 | 85,94 | 108,78% |  |
| 3 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 77 | 83,50 | 108,44% |  |
| 4 | Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil dikonter | 70 | 72,82 | 104,03% |  |
| 5 | Persentase K/L/D yang sudah melaksanakan urusan pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) sesuai peraturan yang berlaku | 80 | 82,67 | 103,34% |  |
| 6 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers | 70 | 85 | 121,43% |  |
| 7 | Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi K/L/D | 5 | 5 | 100% |  |
| 8 | Persentase (%) Pelayanan Informasi dan Pelestarian Bidang Pers dan Komunikasi dan Informasi | 100 | 193 | 193% |  |
| 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 79,03 | 85,75 | 108,50% |  |
| 10 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) | 80 | 100 | 125% |  |

Tabel 9. Capaian Kinerja Eselon I Ditjen IKP

Pada Program Komunikasi Publik, survei kepuasan masyarakat tahun 2023 menunjukkan bahwa 86,39% masyarakat puas terhadap akses dan kualitas konten informasi yang didiseminasi oleh Kementerian Kominfo. Informasi publik yang didiseminasi antara lain berupa kebijakan dan program pemerintah, event

internasional dan nasional, seperti komunikasi publik *event* internasional dan program nasional, informasi program-program prioritas pemerintah di bidang Polhukam, bidang Perekonomian dan Maritim, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Capaian kinerja eselon I Ditjen IKP sebagaimana disajikan dalam Tabel 9 selanjutnya perlu dirinci sesuai indikator kinerjanya masing-masing. Hal itu untuk mengetahui secara rinci mengenai berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pencapaian tersebut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi supaya perencanaan dan capaian kinerja Ditjen IKP kedepannya dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Khusus mengenai Indikator Kinerja No. 1 dan 2 sebagaimana tertuang dalam Tabel 9 diuraikan secara bersamaan. Kedua indikator kinerja tersebut dibahas secara bersama-sama karena merupakan indikator kinerja dari Sasaran Program di lingkup Ditjen IKP yang berkontribusi langsung terhadap capaian Sasaran Strategis IX Kemkominfo.

Capaian B1 dan B2

B.1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Target 79%, Realisasi 86,83%), dan

B.2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Target 79%, Realisasi 85,94%)

Sasaran program di lingkup Ditjen IKP yang berkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis IX Kemkominfo adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah” dapat tergambar melalui hasil survei yang dilakukan kepada Masyarakat.

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | ≥70% | 75% | 71% | 75,5% | 72% | 77,7% | 73% | 79% | 79% | 86,39% |

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Komunikasi Publik 5 Tahun Terakhir

Capaian kinerja komunikasi publik sebesar 86,39% sebagaimana Tabel 10 di tahun 2023 merupakan akumulasi capaian dari Indikator kinerja “Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah” dan “Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah”. Ditjen IKP dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah di tahun 2023, bekerjasama dengan Markplus Inc melakukan survei persepsi. Survei itu dapat menjadi dasar yang menjawab indikator kinerja Ditjen IKP terkait ketersediaan akses dan kualitas informasi publik.

Survei tersebut menggunakan metodologi *mixed methods* (kuantitatif dan kualitatif). Secara kuantitatif, survei dilakukan terhadap 400 responden yang tersebar di 13 kota di Indonesia dengan jumlah penduduk 142.823.700. Margin error-nya adalah 5%. Isu-isu prioritas yang dijadikan objek survei adalah berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP yang mencakup 6 isu.

| No. | Isu Prioritas | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Percepatan penurunan stunting | Percepatan Penurunan Angka Stunting/Gizi Buruk adalah Upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan permasalahan gizi kronis di Indonesia, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang lama. |
| 2. | Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem | Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem merupakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk mencapai target tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024. |

| | | |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Gerakan Bangga Buatan Indonesia | Gerakan Bangga Buatan Indonesia merupakan sebuah Gerakan mengajak seluruh Masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. |
| 4. | Pemindahan Ibu Kota Negara | Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan pengumuman rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. |
| 5. | Keketuaan ASEAN Tahun 2023 | Keketuaan ASEAN Tahun 2023 merupakan momentum kepemimpinan dalam menjawab tantangan ekonomi/politik/sosial/budaya di kawasan Asia Tenggara. |
| 6. | Pemilihan Umum Serentak 2024 | Pemilihan Umum Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi dimana pada tahun 2024, Masyarakat Indonesia akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. |

Tabel 11. Isu Prioritas yang Disurvei

Setelah itu dilakukan FGD zoom (kualitatif) yang dibagi 3 kluster berdasarkan keterjangkauan internet (Jawa, Sumatera-Kalimantan, dan Sulawesi-Nusa Tenggara-Papua). Pelaksanaan FGD bertujuan untuk lebih memperdalam data yang didapat melalui survei kuantitatif.

Dari hasil survei, ada 5 tahapan Masyarakat dalam menyimak isu prioritas nasional yang terdiri dari *aware* (mengetahui), *appeal* (menarik), *ask* (mencari tahu), *act* (bertindak), dan *advocate* (merekomendasi). Kelima tahapan itu merupakan suatu pendekatan yang menguraikan tahapan penting dalam perjalanan masyarakat untuk menyimak isu prioritas nasional. Rincian hasil kelima tahapan tersebut adalah:

1. **Aware:** Mayoritas masyarakat aware terhadap pemberitaan isu-isu prioritas nasional di tahun 2023, terutama terkait Pemilihan Umum Serentak 2024, Pemindahan Ibu Kota Negara, dan Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem. Namun, *awareness* terhadap saluran komunikasi Kemenkominfo tergolong cukup rendah (52,8% responden tidak mengetahui). Selain itu, media komunikasi yang sering digunakan dalam mengetahui informasi keenam isu prioritas nasional adalah media komunikasi interpersonal.
2. **Appeal:** Mayoritas masyarakat menunjukkan tingkat ketertarikan (*appeal*) yang tinggi terhadap isu Pemilihan Umum Serentak 2024 (82,3%), dengan

alasan utama adalah topik informasi/pemberitaan kekinian/*up-to-date* (66,8%). Sementara itu, *appeal* terhadap isu Keketuaan ASEAN Tahun 2023 (7,3%) beserta alasan topik informasi/pemberitaan dikemas dengan format yang sesuai preferensi (21,8%) menunjukkan tingkat yang rendah.

3. **Ask:** Mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan untuk mencari informasi lebih lanjut terkait isu Pemilihan Umum Serentak 2024 (76,8%), sementara 2% dari mereka tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai keenam isu prioritas tersebut. Selain itu, video (87%) menjadi pengemasan informasi/pemberitaan yang paling disukai, diikuti oleh gambar (42,3%), tulisan (41,3%), dan audio (21,3%).
4. **Act:** Mayoritas masyarakat menunjukkan tingkat konsumsi yang sangat tinggi terhadap isu Pemilihan Umum Serentak 2024 (75,5%). Namun, sebanyak 3,5% dari mereka tidak mengonsumsi isu prioritas apapun, dengan alasan utama adalah minimnya sumber informasi (64,3%). Sementara itu, kesesuaian informasi pemberitaan terkait keenam isu prioritas nasional yang beredar di masyarakat dipandang sudah sesuai, dengan rata-rata penilaian 5 dari skala 1-6.
5. **Advocate:** Mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan untuk memilih Pemilihan Umum Serentak 2024 sebagai isu prioritas yang paling direkomendasikan (76,5%). Adapun alasan utama untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan keenam isu prioritas adalah akurasi/detail/faktualnya informasi/pemberitaan (57,8%).

Berdasarkan hasil survei terhadap responden yang *aware* itu, kepuasan terhadap akses informasi publik terkait tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah mencapai 86,83%. Sementara itu, kepuasan terhadap kualitas informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah mencapai 85,94%. Hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek kepuasan masyarakat diperoleh hasil **86,39%** yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini. Detail skor masing-masing aspek kepuasan adalah sebagai berikut:

| No | Variabel | Skor (%) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kepuasan terhadap Kualitas | | |
| 1 | Kualitas Informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi | 86,6% |
| 2 | Kualitas Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi | 85,6% |
| 3 | Kualitas Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan | 85,5% |
| | Indeks Kepuasan terhadap Kualitas | 85,9% |
| Kepuasan terhadap Aksesibilitas | | |

| | | |
|---|------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Akses Informasi dan pemberitaan mudah dijangkau | 87,16% |
| 2 | Akses Informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik | 86,83% |
| | Indeks Kepuasan terhadap Aksesibilitas | 86,8% |
| | Indeks Kepuasan Keseluruhan | 86,3% |

**Tabel 12. Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik
Terkait dengan Isu Prioritas Nasional 2023**

B3. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Target 77%, Realisasi 83,5%)

Survei terhadap perilaku dan pemahaman pemirsa GPRTV menjadi indikator kinerja Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. GPRTV merupakan saluran tayangan agregasi konten, branding, dan duplikasi kanal program audio visual pemerintah (K/L/D) yang dikelola oleh Kemenkominfo. Kehadiran GPRTV bertujuan untuk memberi informasi tentang kebijakan dan program kerja pemerintah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat turut berpartisipasi pada pembangunan. GPRTV disiarkan kepada masyarakat Indonesia, terutama wilayah 3T, melalui satelit, tv kabel, dan internet yang dapat dijangkau melalui ragam saluran.

Pelaksanaan survei ditujukan untuk mengetahui pemahaman pemirsa GPRTV di daerah 3T terhadap konten prioritas pemerintah. Identifikasi daerah 3T merujuk kepada Perpres No. 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Keppres No. 6/2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Dok PTDU Daerah Perbatasan 2015 (Kemendes). Jumlah daerah 3T di Indonesia berhasil diidentifikasi sebanyak 114 daerah.

Dari data wilayah 3T tersebut kami melakukan survei yang dilakukan di 103 daerah. survei dengan hasil penilaian sebanyak 83.5% kualitas siaran dan kualitas program GPRTV dinilai baik dengan persentase Aksesibilitas 95% dari target 77% masyarakat telah mengakses informasi pemerintah dari tujuh kanal yang dikelola Direktorat Pengelola Media, Persentase Pemahaman 95% dari target 80% audiens memahami informasi pemerintah yang dipublikasikan tujuh kanal Direktorat Pengelola Media. Persentase Jangkauan Menjangkau 83% dari target 77% daerah 3T yang dapat mengakses informasi pemerintah melalui tujuh kanal Direktorat

B4. Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter (Target 70%, Realisasi 72,82%)

Hoax merupakan tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya. Cara yang umum melakukan hoax adalah dengan membanjiri suatu media dengan pesan yang salah untuk menutupi pesan yang benar. Penyebaran hoax mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sifat media sosial memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi dan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menulis tanpa peduli latar belakangnya.

Kemenkominfo dalam hal ini Ditjen Aplikasi Informatika dalam rangka penggunaan internet sehat dan aman, secara rutin meningkatkan kualitas penyaringan konten negatif menggunakan aplikasi TRUST+Positif. Dalam melakukan penyaringan, Ditjen Aptika berkoordinasi dengan penyedia jasa internet (ISP). Selanjutnya, Ditjen IKP berperan aktif mengkonter berita hoax yang terdeteksi melalui [https:// trustpositif.kominfo.go.id](https://trustpositif.kominfo.go.id). Pembuatan konten untuk mengkonter berita hoax oleh Ditjen IKP berdasarkan sektor Polhukam, Perekonomian dan Maritim, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

| No | Indikator Kinerja | Target | Capaian Kinerja | Persentase Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 1. | Persentase (%) Berita Hoax bidang Polhukam yang berhasil dikonter | 70% | 100% | >100% |
| 2. | Persentase (%) Berita Hoax bidang Perekonomian dan Maritim yang berhasil dikonter | 85% | 100% | >100% |
| 3. | Persentase (%) Berita Hoaks yang Berhasil Diklarifikasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 70% | 85,06% | >100% |

Tabel 13. Capaian Kinerja: Berita Hoax yang Berhasil Dikonter Tahun 2023

B5. Persentase K/L/D yang sudah melaksanakan urusan pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) sesuai peraturan yang berlaku (Target 80%, Realisasi 82,67%)

Salah satu tugas penting Kemenkominfo adalah sebagai koordinator perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik nasional sebagaimana amanat Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan efisien berperan penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Berdasarkan itu, Kemenkominfo membutuhkan alat ukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi yang dilaksanakan, baik oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Ketersediaan alat ukur berupa Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) bertujuan untuk memudahkan upaya koordinasi melalui penilaian kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik. Keberadaan indeks itu diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan masing-masing instansi secara objektif, baik dari aspek Input, Proses, Output, dan Outcome. Dengan demikian, upaya-upaya peningkatan dan perbaikan program dan kegiatan informasi dan komunikasi publik dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

B6. Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers (Target 70%, Realisasi 85%)

Public Service Obligation (PSO) bidang Pers dilaksanakan oleh Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (LKBN Antara). Kewajiban pelayanan publik untuk informasi publik bidang pers terdiri atas 3 (tiga) bidang pemberitaan yakni: 1. perekonomian, kemaritiman, dan investasi 2. politik hukum. dan keamanan, dan 3. pembangunan manusia dan kebudayaan.

Ketiga bidang pemberitaan itu dikemas oleh LKBN Antara dalam produk yang terdiri dari teks hardnews, teks artikel, foto hardnews, photo story, infografis, TV hardnews, TV features, dan podcast. Berbagai produk LKBN Antara

itu yang terkait PSO Bidang Pers selanjutnya perlu dilakukan survei terhadap pembaca/pemirsanya dan dilakukan di 6 lokasi (Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan).

Di sisi lain dalam rangka akuntabilitas capaian target pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk informasi publik bidang pers tahun anggaran 2023, Ditjen IKP membentuk tim internal untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan PSO tersebut. Tim internal Ditjen IKP melakukan monitoring terhadap capaian kuota produk, cakupan wilayah dan sasaran sebaran produk, dan saluran distribusi produk berdasarkan konstruksi program.

Sementara itu, evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan hasil monitoring tersebut dan analisis kemanfaatan program berdasarkan pengukuran pemenuhan kebutuhan masyarakat atas muatan substansi produk, dan efektivitas kanal produksi. Mengenai tingkat kepuasan masyarakat, hal itu diukur melalui survei terhadap produk LKBN Antara.

Metode yang dilakukan adalah survei terhadap pembaca/pemirsa melalui website LKBN Antara. Di tahun 2023, kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Program Prioritas Pemerintah ditargetkan mencapai 70%. Hasil survei yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP menunjukkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers telah melebihi target yakni mencapai 85%.

| No | Pelaksanaan Survei | Rincian |
|----|-----------------------------|----------|
| 1. | Jumlah responden | 233 |
| 2. | Sebaran responden | 6 lokasi |
| 3. | Tingkat kepuasan masyarakat | 85% |

Tabel 14. Rincian Survei PSO Antara 2023

B7. Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi K/L/D (Target 5, Realisasi 5)

Target regulasi/kebijakan yang perlu dituntaskan di tahun 2023 berjumlah 5 naskah terdiri atas 3 (tiga) naskah kajian kebijakan, dan 2 (dua) rancangan regulasi yakni tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) dan revisi peraturan tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas. Semua naskah tersebut berhasil dituntaskan di lingkup Ditjen IKP tahun 2023 yang selengkapya

mencakup: Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional.

1. Kajian Proses Bisnis Aplikasi Umum Monitoring Isu
2. Kajian Layanan Komunikasi Krisis Nasional yang Terintegrasi
3. Kajian Naskah Akademik Revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Revisi Peraturan Menkominfo tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH)
5. Dokumen Naskah Akademik Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional

B8. Persentase Pelayanan Informasi dan Pelestarian Bidang Pers dan Komunikasi dan Informasi

Target Pelayanan Informasi dan Pelestarian Bidang Pers dan Komunikasi dan Informasi dilakukan di 2 UPT yaitu di museum penerangan dan monumen pers. target jumlah pengunjung telah tercapai dengan jumlah pengunjung Monumen Pers Nasional 236.546 pengunjung dengan persentase (236,55%) dari target yang ditetapkan, dan pengunjung Museum Penerangan sebanyak 187.931 pengunjung dengan persentase (150,34%) dari target yang ditetapkan.

B9. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) (Target 79,03, Realisasi 85,75%)

Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen IKP dihitung berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) yang telah divalidasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkominfo c.q Inspektorat III. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Peraturan nomor: PER-01/ AAIP/ DPN/ 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

B10. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1) (Target 80, Realisasi 100)

Telah ditetapkan indikator indeks opini BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dimana Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik memperoleh nilai UAPPA E1 sebesar 100 dari target yang telah ditetapkan sebesar 80.

| No | Indikator Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I | Metode Penilaian | | | BPSDM | | Ditjen IKP | | BLU BAKTI | | Kementerian Kominfo |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| | | Bobot | Faktor Pengurangan | Persentase Pengurangan | Nilai Pengurangan | Nilai Rata-rata Satker | Nilai Konversi | Nilai Rata-rata Satker | Nilai Konversi | Nilai Rata-rata Satker | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) x (2) | (5) = (4) x 100 | | | | | | |
| I | Indeks | | | | | 100 | | 100 | | 100 | 100,00 |
| II | Faktor Pengurang: | | | | | -10 | | 0 | | -40 | -12,50 |
| 1. | Jumlah Temuan yang Mempengaruhi Opini BPK | 50% | | | | 0 | | 0 | | -15 | -1,88 |
| | 1) Tidak ada temuan | | 0% | 0% | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 2) Jumlah temuan 1 | | -20% | -10% | -10 | | | | | | |
| | 3) Jumlah temuan 2 s.d. 3 | | -30% | -15% | -15 | | | | | -15 | |
| | 4) Jumlah temuan lebih dari 3 | | -50% | -25% | -25 | | | | | | |
| 2. | Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Eselon I/Kementerian | 50% | | | | -10 | | 0 | | -25 | -10,63 |
| | 1) Nilai 100 | | 0% | 0% | 0 | | | 100 | 0 | | |
| | 2) Nilai 90 - 99,99 | | -20% | -10% | -10 | 98,18 | -10 | | | | |
| | 3) Nilai 80 - 89 | | -30% | -15% | -15 | | | | | | |
| | 4) Nilai dibawah 80 | | -50% | -25% | -25 | | | | | 65 | -25 |
| III | Nilai Akhir (I) + (II) | | | | | 90 | | 100 | | 60 | 87,50 |

C. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP

Beragam indikator kinerja kegiatan satuan kerja di lingkungan Ditjen IKP pada hakikatnya adalah pendorong dalam rangka memenuhi indikator kinerja sasaran program tingkat Ditjen IKP yang pada gilirannya untuk mencapai Sasaran Strategis Kemenkominfo. Dorongan tersebut dapat berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi indikator kinerja Ditjen IKP. Berhasil atau tidaknya dalam memenuhi indikator kinerja kegiatan di lingkup satuan kerja mempengaruhi secara langsung capaian kinerja Ditjen IKP.

C. Capaian Kinerja di Lingkup Satuan Kerja

1. Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (Direktorat TKKKP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi publik. Kinerja Direktorat TKKKP difokuskan kepada perwujudan tata kelola sistem komunikasi di Indonesia, pelaksanaan kebijakan komunikasi, dan peningkatan kompetensi lembaga maupun aparatur pelayanan komunikasi dan informasi.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi Publik. | Jumlah Kajian/Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi K/L/D. | 4 Rekomendasi Kebijakan | 4 Rekomendasi Kebijakan | 100 |
| | | Jumlah Regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). | 1 Naskah RPM | 1 Naskah RPM | 100 |
| | | Jumlah Regulasi Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pengelolaan Bidang Komunikasi Publik yang Selesai Disusun | 4 NSPK | 4 NSPK | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. | Persentase ASN yang Meningkatkan Pemahamannya Terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi | 70% (Skala 1-100) | 88,39% | 126,27 |
| | | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) | Indeks 70 | Indeks 69,75 | 99,64 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Persentase (%) PPID yang Meningkatkan Kepatuhannya Melaksanakan Fungsi sesuai UU KIP. | 74% | 64,80% | 87,57 |
| | | Jumlah Kecamatan di Wilayah 3T yang Menerima Layanan Informasi Publik melalui Petugas Informasi Publik. | 650 Kecamatan | 653 Kecamatan | 100,46 |
| | | Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM, Bako Humas, Petugas Informasi Publik/PIP, Satgas Medsos) yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional. | 80% | 94,69% | 118,37 |
| | | Tingkat Kepuasan JFPH terhadap Pelayanan yang Dilakukan Kemenkominfo sebagai Instansi Pembina JFPH | 75% | 87,17% | 116,23 |
| 3 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik | Persentase (%) Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) di Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik | 70% | 76,17% | 108,81 |

Tabel 15. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2023

Berdasarkan indikator kinerja (10 indikator) Direktorat TKKKP sebagaimana Tabel 18, sembilan indikator diantaranya berhasil memenuhi target. Satu indikator lainnya yakni Persentase (%) PPID yang Meningkatkan Kepatuhannya Melaksanakan Fungsi sesuai UU KIP masih belum mencapai target sehingga perlu ditingkatkan di tahun berikutnya.

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat TKKKP mengacu pada sasaran Program Perjanjian Kinerja Eselon I Ditjen IKP. Dari beragam indikator kinerja kegiatan di lingkup Direktorat TKKKP, indikator yang berkaitan langsung dengan capaian kinerja Eselon I adalah (1) Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi K/L/D (2) Jumlah Regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). (3) Jumlah Regulasi Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK). dan (4) Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D.

Selanjutnya secara rinci, capaian Direktorat TKKKP di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi Publik
 - a. Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi K/L/D.
 - 1) Kajian Naskah Akademik Revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kajian Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional (Draft Naskah Akademik dan RPerpres);
 - 3) Kajian Layanan Komunikasi Krisis Nasional Yang Terintegrasi.
 - b. Jumlah Regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)
 - 1 Draft Revisi Peraturan Menteri Kominfo tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas
 - c. Jumlah Regulasi Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
 1. NSPK Pedoman Uji Kompetensi JFPH;
 2. NSPK Pedoman Kurikulum Pelatihan Pembentukan JFPH;
 3. NSPK Pedoman Kurikulum Pelatihan Teknis JFPH;
 4. NSPK Panduan Teknis Komunikasi Publik.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Tercapainya jumlah target ASN yang memahami terkait pengelolaan informasi dan komunikasi melalui Bimtek;
 - b. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D;
 - c. Persentase (%) PPID yang meningkat kepatuhannya melaksanakan fungsi;
 - d. Jumlah kecamatan di wilayah 3T dan wilayah lainnya yang menerima Layanan Informasi Publik melalui Petugas Informasi Publik;
 - e. Persentase (%) Mitra Strategis (Komunitas Informasi Masyarakat/KIM, Bako Humas Petugas Informasi Publik /PIP) yang melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional;

- f. Persentase (75%) Tingkat kepuasan JFPH terhadap pelayanan yang dilakukan kemkominfo sebagai instansi Pembina JFPH.
3. Meningkatnya layanan pegawai di Direktorat TKKKP: Persentase kepuasan pegawai tentang layanan kesekretariatan (keuangan, persuratan, kepegawaian, Barang Milik Negara, perencanaan program dan pelaporan di Dit TKKKP).

2. Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan

Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Direktorat IK Polhukam) mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi politik, hukum dan keamanan. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, kegiatan Direktorat IK Polhukam lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi bidang Polhukam.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Pemerintah Bidang Polhukam | 79% | 78,25% | 99,05 |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Pemerintah Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat | 65% | 41,57% | 63,96 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Polhukam Melalui Media Elektronik | 20.000.000 Orang | 49.347.743 Orang | 246,74 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah bidang Polhukam Melalui | 400.000 <i>Engagement</i> | 1.902.211 <i>Engagement</i> | 475,55 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | Media <i>Online</i> dan Media Sosial | | | |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Polhukam Melalui Media Tatap Muka | 7.000 Orang | 17.787 Orang | 254,1 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Polhukam Melalui Media Luar Ruang | 5.000.000 Orang | 23.672.749 Orang | 473,45 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Melalui Media Elektronik | 10.000.000 Orang | 7.062.373 Orang | 70,62 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Melalui Media Cetak | 200.000 Orang | 507.039 Orang | 253,52 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Melalui Media Sosial | 150.000 <i>Engagement</i> | 466.122 Orang | 310,75 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Melalui Media <i>Online</i> | 1.500.000 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 1.826.430 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 121,76 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program | | 3.350 | 167,50 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| | | dan Kebijakan Pemerintah Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Melalui Media Tatap Muka 2.000 Orang | | Orang | |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Melalui Media Luar Ruang | 300.000 Orang | 536.854 Orang | 178,95 |
| | | Persentase (%) Berita Hoax Bidang Polhukam yang Berhasil Diklarifikasi | 70% | 100% | 142,86 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IK. Polhukam | Persentase (%) Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) di Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan | 85% | 88% | 103,53 |

Tabel 16. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2023

Sebagaimana Tabel 19, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IK Polhukam yakni sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta Meningkatkan Layanan Pegawai di Direktorat IK Polhukam. Sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I “Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah”.

Indikator kinerja sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IK Polhukam tersebut terdiri dari 2 (dua) yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi kebijakan

dan program prioritas pemerintah bidang Polhukam dan Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Selebihnya sejumlah 11 indikator lainnya dalam sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah adalah indikator kinerja kegiatan yang bersifat *output* untuk mendukung capaian kinerja yang bersifat *outcome*.

Dari 11 indikator kinerja yang bersifat *output* tersebut, capaian 10 (sepuluh) indikator diantaranya melebihi target yang ditetapkan. Bahkan sebanyak 8 dari 10 target tersebut jauh melebihi target. Pencapaian realisasi yang jauh melebihi target itu perlu menjadi perhatian di tahun mendatang, baik mengenai penentuan targetnya maupun strateginya supaya tidak terjadi capaian yang anomali. Selain itu, sebanyak 2 indikator lainnya justru tidak mencapai target sehingga perlu diperbaiki di tahun mendatang. Khusus untuk indikator kinerja Persentase Berita Hoax Bidang Polhukam yang Berhasil Diklarifikasi memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP.

Sementara indikator yang bersifat *outcome* yakni indikator kinerja Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Polhukam dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Kedua indikator *outcome* di lingkup Dit IK Polhukam itu seyogianya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Penghitungan capaian kinerja di lingkup Ditjen IKP terkait hal itu masih menggunakan perhitungan tersendiri berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

3. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim

Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktorat IKPM) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor keuangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Kegiatan Direktorat IKPM lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi bidang perekonomian dan maritim sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi Dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perekonomian Dan Maritim | 79% | 93,75% | 118,67 |
| | | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara | 79% | 79% | 100 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim Melalui Media Elektronik | 25.000.000 Orang | 26.192.000 Orang | 104,77 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim Melalui Media Sosial | 90.000 <i>Engagement</i> | 90.710 <i>Engagement</i> | 100,79 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim Melalui Media <i>Online</i> | 4.000.000 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 4.059.100 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 101,48 |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim Melalui Media Pertunra dan Tatap Muka | 35.000 Orang | 35.074 Orang | 100,21 |
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim Melalui Media Luar Ruang | 10.000.000 Orang | 10.010.966 Orang | 100,11 |
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim Melalui Media Cetak | 1.500.000 Orang | 1.510.216 Orang | 100,68 |
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media Elektronik | 3.500.000 Orang | 3.499.532 Orang | 99,99 |
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media Sosial | 15.000 <i>Engagement</i> | 14.965 <i>Engagement</i> | 99,77 |
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media <i>Online</i> | 750.000 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 723.884 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 96,52 |
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media Pertunra dan Tatap Muka | 5.000 Orang | 4.819 Orang | 96,38 |
| | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media Luar Ruang | 2.500.000 Orang | 2.462.551 Orang | 98,50 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media Cetak | 250.000 Orang | 257.328 Orang | 102,93 |
| | | Persentase (%) Berita Hoax Bidang Perekonomian dan Maritim yang Berhasil Dikonter | 85% | 100% | 117,65 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IK.Perekonomian Dan Maritim | Persentase (%) Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) di Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 85% | 100% | 117,65 |

Tabel 17. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Tahun 2023

Sebagaimana Tabel 20, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IKPM yakni Sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta Meningkatkan Layanan Pegawai di Direktorat IKPM. Sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah terdiri 2 (dua) kategori yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah bidang Polhukam dan Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Selebihnya sejumlah 13 indikator lainnya dalam sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah adalah indikator kinerja kegiatan yang bersifat *output* untuk mendukung capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Dari semua indikator kinerja yang bersifat *output* maupun *outcome*, seluruhnya berhasil mencapai target yang ditetapkan. Khusus mengenai indikator

kinerja Persentase Berita Hoax Bidang Perekonomian dan Maritim yang Berhasil Diklarifikasi memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP.

Sementara itu, indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Perekonomian dan Maritim dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Kedua indikator *outcome* itu seyogianya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Penghitungan indikator Ditjen IKP itu di tahun 2023 masih menggunakan perhitungan tersendiri berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

4. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Dit IKPMK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi. Kegiatan Direktorat IKPMK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi Dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Pemerintah Bidang PMK | 79% | 79,15% | 100,19 |
| | | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Pemerintah Bidang <i>Stunting</i> | 79% | 83,32% | 105,47 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Elektronik | 4.200.000 Orang | 5.381.771 Orang | 128,14 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Cetak | 500.000 Orang | 628.705 Orang | 125,74 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Sosial | 350.000 <i>Engagement</i> | 374.082 <i>Engagement</i> | 106,88 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media <i>Online</i> | 1.600.000 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 1.887.969 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 118 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Tatap Muka dan Pertunra | 14.000 Orang | 16.979 Orang | 121,28 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Luar Ruang | 5.000.000 Orang | 6.645.211 Orang | 132,90 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan <i>Stunting</i> Melalui Media Elektronik | 2.100.000 Orang | 2.416.915 Orang | 115,09 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan <i>Stunting</i> Melalui Media Cetak | 350.000 Orang | 491.690 Orang | 140,48 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan <i>Stunting</i> Melalui Media Sosial | 2.850.000. <i>Engagement</i> | 3.014.238 <i>Engagement</i> | 105,76 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan <i>Stunting</i> Melalui Media <i>Online</i> | 1.575.000 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 1.854.246 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 117,73 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan <i>Stunting</i> Melalui Media Tatap Muka dan Pertunra | 4.100 Orang | 5.638 Orang | 137,51 |
| | | Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan <i>Stunting</i> Media Luar Ruang | 3.000.000 Orang | 3.140.062 Orang | 104,67 |
| | | Persentase (%) Berita Hoaks Bidang PMK yang Berhasil Diklarifikasi | 70% | 85,06% | 121,51 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IK.Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Persentase (%) Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) di Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 85% | 91,40% | 107,53 |

Tabel 18. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023

Sebagaimana Tabel 21, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IKPMK yakni Sasaran kegiatan Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IKPM. Khusus sasaran kegiatan Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I yakni Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah mencakup 2 (dua) kategori yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Stunting. Selebihnya sejumlah 13 indikator lainnya dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah adalah indikator kinerja kegiatan yang bersifat *output* untuk mendukung capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Dari seluruh indikator baik yang bersifat *output* maupun *outcome*, semuanya berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Mengenai korelasi antara kinerja Dit IKPMK dan Ditjen IKP, khusus indikator kinerja Persentase Berita Hoax Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Berhasil Diklarifikasi memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP. Salah satu indikator dalam perhitungan kinerja Ditjen IKP adalah indikator kinerja Dit IKPMK itu.

Sementara mengenai indikator yang bersifat *outcome*, indikator kinerja Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Stunting dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Kedua indikator *outcome* di lingkup Dit IKPMK itu seyogyanya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Penghitungan indikator Ditjen IKP tersebut di tahun 2023 masih menggunakan perhitungan tersendiri

berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

5. Direktorat Pengelolaan Media

Direktorat Pengelolaan Media (Direktorat PM) mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media online, cetak, audio visual, dan media sosial. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kegiatan Direktorat PM lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah melalui media yang dikelola pemerintah.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Yang Dikelola Pemerintah | Persentase (%) Masyarakat yang Mengakses Informasi Program Prioritas Pemerintah Melalui Media Pemerintah (<i>Owned Media</i>) | 77 % | 82,47% | 107,10 |
| | | Persentase (%) Daerah 3T yang Dapat Mengakses Program Pemerintah Melalui <i>Owned Media</i> | 50% | 47% | 94 |
| | | Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah Melalui <i>Owned Media</i> | 80% | 95% | 118,75 |
| | | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 65% | 97% | 149,23 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat Pengelolaan Media | Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Manajemen Di Direktorat Pengelolaan Media | 85 % | 80% | 94,12 |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|

Tabel 19. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2023

Sebagaimana Tabel 22, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat PM yakni Sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta Meningkatkan Layanan Pegawai di Direktorat PM. Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Penyebaran Informasi Publik melalui Media yang Dikelola Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Seluruh indikator kinerja kegiatan dalam sasaran ini berhasil mencapai target.

Indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Penyebaran Informasi Publik melalui Media yang Dikelola Pemerintah terbagi 2 (dua) yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator kinerja yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah melalui Own Media dan Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah, Sementara itu, indikator kinerja yang bersifat *output* adalah Persentase (%) Masyarakat yang Mengakses Informasi Program Prioritas Pemerintah melalui Media Pemerintah (Own Media) dan Persentase (%) Daerah 3T yang Dapat Mengakses Program Pemerintah Melalui Own Media. Kedua indikator *output* itu ditujukan untuk mendorong capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Khusus mengenai indikator kinerja Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP.

Sementara itu, indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah melalui Own Media dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Indikator *outcome* itu seyogianya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP

yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Penghitungan indikator Ditjen IKP tersebut di tahun 2023 masih menggunakan perhitungan tersendiri berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

6. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Sekretariat Ditjen IKP mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen IKP. Sekretariat Ditjen IKP secara kelembagaan berperan penting dalam mendukung organisasi secara teknis dan administratif dalam hal administrasi keuangan, aset negara, kepegawaian, perencanaan, pengawasan kinerja, serta hukum dan kerjasama.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Bersih dan Efisien | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP Tahun 2023 | 79,03 | 85,75 | 108,50 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen IKP Tahun 2023 | 67,90 | 75,50 | 111,19 |
| | | Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen IKP Tahun 2023 | 3,36 | 4,27 | 127,08 |
| | | Nilai SPIP Ditjen IKP Tahun 2023 | 3,00 | 4,33 | 144,33 |
| | | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2023 | 87 | 92,11 | 105,87 |
| | | Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen IKP Tahun 2023 | 1% | 0,02% | 5.000 |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen IKP pada Tahun 2023 | 70 % | 71,89% | 102,70 |
| | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen IKP pada Tahun 2023 | 30 % | 75% | 250 |
| | Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 100% | 100% | 100 |
| | Persentase (%) Berita Kenegaraan Melalui Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers (PSO ANTARA) yang Terverifikasi | 95% | 99,58% | 104,82 |
| | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) | 80 | 100 | 125 |
| | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) | 80 | 100 | 125 |

Tabel 20. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023

Berkaitan dengan sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Bersih dan Efisien sebagaimana tercantum dalam Tabel 23, terdapat 12 indikator kinerja. Dari ke-12 indikator tersebut, seluruhnya berhasil mencapai target.

Walaupun kegiatan Sekretariat Ditjen IKP secara umum bersifat *supporting* di lingkup Ditjen IKP, terdapat juga indikator kinerjanya yang berkaitan langsung terhadap capaian kinerja eselon I yakni Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Ditjen IKP Tahun 2023 dan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1). Kedua indikator itu termasuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Bersih dan Efisien. Capaian kedua indikator itu otomatis menjadi perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP. Khusus Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen IKP Tahun 2023, capaiannya menjadi perhitungan kinerja eselon I Ditjen IKP yakni Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Nilai yang diperoleh Ditjen IKP atas hasil evaluasi RB internal oleh Inspektorat Jenderal Kemkominfo sebagai pendukung nilai RB tingkat Kementerian senilai 85,40 sehingga otomatis memenuhi capaian kinerja di tingkat eselon I Ditjen IKP yang ditargetkan senilai 80.

7. Museum Penerangan

Museum Penerangan sebagai tercantum dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara administratif, Museum Penerangan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Tugas Museum Penerangan adalah melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas itu, Museum Penerangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelestarian benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan sarana diseminasi informasi;
- d. pelaksanaan konservasi dan restorasi benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi | 90 | 94,02 | 104,47 |
| | | Jumlah Pengunjung Museum Penerangan Offline dan Online (Virtual Experience) | 87.500 Orang | 143.203 Orang | 163,66 |
| | | Jumlah Pengunjung Museum Penerangan Engagement Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok dan Youtube) | 37.500 Engagement | 44.728 Engagement | 119,27 |
| | | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Museum Penerangan | 85 | 94,54 | 111,22 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Museum Penerangan | Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan, Program dan Pelaporan) di Museum Penerangan | 80% | 81,07% | 101,34 |

Tabel 21. Capaian Perjanjian Kinerja Museum Penerangan Tahun 2023

Sebagaimana Tabel 24, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Museum Penerangan yakni Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi dan Meningkatnya Layanan Pegawai di Museum Penerangan. Seluruh indikator kinerja kegiatan berhasil mencapai target. Sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri dari 2 (dua) kategori yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator kinerja yang bersifat *outcome* yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi sedangkan lainnya bersifat *output*. Khusus indikator kinerja Jumlah Pengunjung Museum Penerangan Offline dan Online (Virtual

Experience), capaiannya jauh melebihi target. Capaian yang jauh melebihi target tersebut perlu menjadi perhatian di tahun mendatang mengenai penentuan targetnya supaya tidak terjadi capaian yang anomali.

8. Monumen Pers Nasional

Monumen Pers sebagaimana Permenkominfo No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara administratif, Monumen Pers Nasional dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Tugas Monumen Pers Nasional adalah melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai Monumen Pers Nasional dan produk pers nasional yang bernilai sejarah. Dalam melaksanakan itu, Monumen Pers Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Monumen Pers Nasional;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi dan penyiapan sarana diseminasi;
- c. pemeliharaan, penatalaksanaan koleksi, pengawetan, dan perlindungan benda di bidang pers yang bernilai sejarah, serta pengelolaan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 1 | Terselenggara-nya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Pers | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelestarian Bidang Pers di Monumen Pers Nasional | 90 | 89,38 | 99,31% |
| | | Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional Offline dan Online (Virtual Experience) | 100.000 Orang | 133.342 | 133,34% |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | | Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional: Website dan Engagement Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok dan Youtube) | 50.000 Engagement | 103.204 Engagement | 206% |
| | | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Monumen Pers Nasional | 87 | 89.00 | 104.70% |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Monumen Pers Nasional | Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan, Program dan Pelaporan) di Monumen Pers Nasional | 80% | 81.50 | 95.88% |

Tabel 22. Capaian Perjanjian Kinerja Monumen Pers Tahun 2023

Sebagaimana Tabel 25, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Monumen Pers Nasional yakni Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers dan Meningkatkan Layanan Pegawai di Monumen Pers Nasional. Sebagian besar indikator kinerja kegiatan berhasil mencapai target. Hanya 1 indikator yang tidak tercapai, tetapi tidak jauh dibawah target yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Pers terbagi 2 (dua) yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator kinerja yang bersifat *outcome* yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Benda Bersejarah di Bidang Pers sedangkan lainnya bersifat *output*. Khusus indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelestarian Bidang Pers di Monumen Pers Nasional masih sedikit di bawah target.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2023 ikut berkontribusi pada strategi aksi yang tertuang dalam berbagai kebijakan nasional. Adapun hal-hal yang menjadi kontribusi pada tahun 2023 ialah:

1. Rencana Aksi Nasional Jaminan Kesehatan Nasional (RAN JKN)

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

| Target Aksi | Realisasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kampanye melalui Televisi Nasional. | <ul style="list-style-type: none">• Penayangan ILM di Kompas TV (20 spot) di bulan Juni-Juli. Konten didapat dari BPJS Kesehatan.• Koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait konten ILM. |
| Pemasangan materi sosialisasi melalui Owned milik Kominfo: GPRTV, Indonesia Baik (FB,IG, Twitter), FMB9, Infopublik.id, Majalah GPR News). | Penayangan materi sosialisasi terkait BPJS Kesehatan di kanal media yang dimiliki Ditjen IKP. |

2. Rencana Aksi Nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (RAN Jamsostek)

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

| Target Aksi | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kampanye melalui Media Elektronik, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka/Petunra. | <ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan 4 kegiatan Penayangan ILM BPJS Ketenagakerjaan di Bali TV, JTV, JOGJA TV, dan TATV.• Sosialisasi Jaminan Perlindungan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | melalui Media Luar Ruang (billboard/ videotron). |
| Pemasangan materi sosialisasi melalui Owned milik Kominfo: GPRTV, Indonesia Baik (FB,IG, Twitter), FMB9, Infopublik.id, Majalah GPR News). | Penayangan materi sosialisasi terkait BPJS Kesehatan di kanal media yang dimiliki Ditjen IKP. |

3. Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

| Target Aksi | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategi Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. | Telah tersusun dokumen strategi komunikasi publik dan diseminasi informasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. |

4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RAN P4GN)

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

| Target Aksi | Realisasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseminasi informasi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. | <ul style="list-style-type: none"> • Produksi konten dan diseminasi informasi bahaya Narkoba di media sosial Ditjen IKP. • Diseminasi informasi dan sosialisasi pencegahan dan bahaya Narkoba kepada ASN, TNI, Polri, mahasiswa dan masyarakat umum melalui forum, media online dan elektronik (Voi.Id, suaramerdeka.com, dan tribunnews.com, Youtuber, Website). |



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh capaian kinerja di lingkup Eselon I Ditjen IKP telah memenuhi bobot 100%. Sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran program Ditjen IKP telah memenuhi target. Pencapaian kinerja di lingkup Eselon I tersebut mendukung (berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kementerian (IKK) Kemenkominfo. Kondisi itu menandakan bahwa capaian kinerja di lingkungan Ditjen IKP sudah memenuhi target yang direncanakan.

| No | Indikator Kinerja Sasaran Program Eselon I | Target 2023 | Capaian Kinerja | Presentase Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. | 79 | 86,83 | 109,91% |
| 2 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. | 79 | 85,94 | 108,78% |



| No | Indikator Kinerja Sasaran Program Kementerian | Target 2023 | Capaian Kinerja | Presentase Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | >79% | 86,39% | 100,35% |

Tabel 23. Korelasi Indikator Kinerja Ditjen IKP terhadap IKK Kemenkominfo

Hasil pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan satuan kerja dan UPT di lingkungan Ditjen IKP Tahun 2023 sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Capaian itu menandakan bahwa satuan kerja di lingkup Ditjen IKP secara umum sudah memenuhi target yang direncanakan. Pencapaian indikator di tingkat satuan kerja tersebut mendukung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Ditjen IKP.

Dalam rangka pencapaian proyek prioritas RPJMN 2020-2024 mengenai penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T, dengan indikator Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik, maka di tahun 2023 dilakukan penajaman Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik dibandingkan tahun sebelumnya. Penajaman itu diperlukan agar pengukuran kepuasan masyarakat di daerah 3T terkait konten dan akses informasi publik dapat lebih fokus dan akurat terhadap Masyarakat di wilayah tersebut. Penajaman itu diperlukan untuk mendorong pengukuran capaian tingkat kepuasan di daerah 3T melalui metode survei yang sebelumnya seringkali mengalami kendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

B. Saran dan Upaya Perbaikan

Beberapa perbaikan pada strategi penyampaian dan penyebaran informasi diperlukan guna meningkatkan kualitas informasi terkait isu-isu prioritas nasional sebagai berikut:

1. Ditjen IKP akan mengusulkan pembuatan standar komunikasi publik bagi pemerintah dalam bentuk Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional.
2. Ditjen IKP Kemenkominfo sebaiknya perlu memanfaatkan seluruh saluran resmi yang dimilikinya serta berbagai jenis media komunikasi lainnya seperti media massa konvensional dan media komunikasi luar ruang dalam melaksanakan kampanye pemasaran dan penyebaran isu-isu prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki awareness yang memadai mengenai isu-isu terkini yang telah dianggap urgensi atau prioritas oleh pemerintah nasional.
3. Ditjen IKP Kemenkominfo dapat melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam upaya menarik perhatian masyarakat terkait isu-isu

prioritas nasional. Mengingat mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan untuk tertarik pada informasi yang kekinian/*up-to-date*. Ditjen IKP Kemenkominfo dapat meningkatkan kecepatan penyebaran informasi ke berbagai platform, terutama dalam situasi darurat atau ketika isu tertentu menjadi perhatian dan kebutuhan utama masyarakat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan tren dan urgensi isu dapat memberikan dampak positif terhadap jangkauan dan daya tarik informasi.

4. Hasil survei menunjukkan bahwa isu prioritas nasional yang paling banyak dipilih adalah mengenai Isu Pemilihan Umum Serentak 2024. Hal ini dapat disebabkan karena tahun politik yang sudah dekat. Sementara itu, isu-isu prioritas nasional lainnya masih kurang populer. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen IKP Kemenkominfo perlu mengemas pemberitaan isu-isu menjadi lebih menarik lagi. Misalnya dengan membuat lebih banyak konten video, sejalan dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa video adalah cara pengemasan berita yang paling disukai.
5. Masalah yang dialami oleh masyarakat yang tidak mengakses keenam isu prioritas nasional adalah terkait sumber informasi yang minim. Dengan kata lain, masyarakat tidak mengetahui mana yang merupakan isu prioritas nasional atau bukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ditjen IKP Kemenkominfo dapat mempertimbangkan penambahan kategori khusus di portal berita Ditjen IKP Kemenkominfo sebagai arsip bagi pemberitaan-pemberitaan yang merupakan isu prioritas nasional. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kejelasan informasi mengenai isu-isu prioritas nasional dan secara efektif meningkatkan tingkat konsumsi informasi masyarakat terhadap isu-isu tersebut.
6. Pemberitaan mengenai isu prioritas nasional yang disajikan oleh Ditjen IKP Kemenkominfo seharusnya bersifat unik dan persuasif. Misalnya dengan mengintegrasikan pemberitaan isu prioritas nasional dengan program prioritas nasional yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam mendukung serta mengadvokasi pemberitaan mengenai isu prioritas nasional tersebut.
7. Beberapa target kinerja kegiatan tingkat satuan kerja di lingkungan Ditjen IKP masih ada yang belum tercapai sehingga perlu dilakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya supaya program dan kegiatan di lingkungan Ditjen IKP dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, beberapa capaian justru jauh melampaui target yang ditetapkan. Berbagai permasalahan itu perlu

diselaraskan di tahun-tahun berikutnya baik berupa targetnya dan/atau metodenya. Selain itu, korelasi antara indikator kinerja di lingkup satuan kerja dan UPT perlu lebih dipertajam.

C. Kendala dan Permasalahan

Belum adanya instrumen terkait Tata Kelola Komunikasi Publik secara Nasional yang membuat isu-isu prioritas banyak tersampaikan melalui narasi yang berbeda-beda dan *timing* yang tidak serentak. Hal tersebut mempengaruhi perhatian masyarakat khususnya dengan kondisi saat ini dimana informasi sangat berlimpah dan cepat diranah publik.

Instrumen yang menjadi landasan pelaksanaan komunikasi publik yang tertuang pada Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik secara pelaksanaan masih kurang kuat dalam membentuk narasi tunggal yang serentak khususnya diranah K/L/D.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional.

Dokumen Laporan Akhir Survei Akses dan Kualitas Informasi Prioritas Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo bekerjasama dengan Markplus.Inc.

Dok. PTDU Daerah Perbatasan 2015. Kemendes.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2023 - Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

Laporan Survei Perilaku dan Pemahaman Pemirsa GPRTV 2023. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

“Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik”.

<https://pantau.kominfo.go.id/pantau/index.php>. Diakses 15 Februari 2024.

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 & 2023

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 sebesar 108,94 poin dari 10 indikator sasaran program secara kumulatif atau naik 1 poin apabila dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 107,66 poin secara kumulatif dari 8 indikator sasaran program. Secara realisasi anggaran pada tahun 2023 terserap 97,78%, meskipun lebih rendah dari pada realisasi pada tahun 2022 secara capaian kinerja Ditjen IKP mengalami kenaikan. Adapun selisih adanya penurunan realisasi pada 2023 disebabkan adanya pelaksanaan aktivitas renovasi prasarana perkantoran yang dialihkan kepada kegiatan prioritas lainnya.

Realisasi Anggaran Tahun 2023

| No | Unit Kerja | Pagu Dipa | Realisasi | Persentase (%) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik | 29.004.000.000 | 28.532.205.315 | 98,37 |
| 2 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan | 202.096.924.000 | 199.583.835.919 | 98,76 |
| 3 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 44.625.369.000 | 44.520.097.284 | 99,76 |
| 4 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 50.315.032.000 | 49.365.909.503 | 98,11 |
| 5 | Direktorat Pengelolaan Media | 35.542.600.000 | 35.129.329.196 | 98,84 |
| 6 | Sekretariat Direktorat Jenderal IKP | 75.679.607.000 | 71.321.861.366 | 94,24 |
| 7 | Monumen Pers Surakarta | 13.538.439.000 | 12.513.319.018 | 92,43 |
| 8 | Museum Penerangan TMII | 14.406.397.000 | 13.891.106.320 | 96,42 |
| Jumlah | | 465.208.368.000 | 454.857.663.921 | 97,78 |

Realisasi Anggaran TA 2022

| No | Unit Kerja | Pagu Dipa | Realisasi | Persentase (%) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik | 20.347.634.000 | 20.179.130.653 | 99,17 |
| 2 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan | 73.631.026.000 | 73.000.804.423 | 99,14 |
| 3 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 32.968.431.000 | 32.916.234.091 | 99,84 |
| 4 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 56.076.602.000 | 55.904.068.183 | 99,69 |
| 5 | Direktorat Pengelolaan Media | 96.853.702.000 | 96.491.642.447 | 99,63 |
| 6 | Sekretariat Direktorat Jenderal IKP | 203.060.887.000 | 199.413.355.336 | 98,20 |
| 7 | Monumen Pers Surakarta | 11.425.198.000 | 11.148.800.463 | 97,58 |
| 8 | Museum Penerangan TMII | 13.581.922.000 | 12.845.259.753 | 94,58 |
| Jumlah | | 507.945.402.000 | 501.899.295.349 | 98,81 |

